



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : RSUD DR. ZAINOEL ABIDIN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NURNIKMAH**
2. Jabatan : **WAKIL DIREKTUR PENUNJANG**
3. NHK : **831734**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.456.000.000

1. Tanah Seluas 149 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 257 m2/36 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, WARISAN Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 90 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 36.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/36 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 250.000.000
5. Tanah Seluas 355 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
6. Tanah Seluas 2607 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 463 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 335.000.000

1. MOBIL, HONDA CR-V Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA GL 200 Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 276.300.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	793.266.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	60.000.000
Sub Total	Rp.	3.920.566.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.920.566.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.